KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 550 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, perlu dilakukan pemberian kuasa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama;

b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tata kelola kepegawaian sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Memberikan kuasa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama kepada Pejabat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal:

a. Kepala Biro Kepegawaian, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, atau Kepala Badan belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Sekretaris Jenderal;
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk universitas dan institut belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
d. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk sekolah tinggi belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

KETIGA : Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang berbentuk universitas dan institut ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama; dan
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 550 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS-JENIS MUTASI | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN PUSAT | | | | |
| A | SEKRETARIAT JENDERAL | 1. Kenaikan Pangkat:<br>a. PNS yang menduduki jabatan Profesor;<br>b. kenaikan pangkat luar biasa;<br>c. kenaikan pangkat istimewa; dan<br>d. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden; | | Seluruh Satuan Kerja |
| | 1. Sekretaris Jenderal; | 2. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi; | Administrator | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Pemindahan dalam jabatan bagi:<br>a. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; | Administrator | Seluruh Satuan Kerja |
| | | b. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi:<br>1) Antar-Unit Kerja Kementerian Agama Pusat;<br>2) Antar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;<br>3) Antar Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;<br>4) Antar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan<br>5) Antar Unit Kerja Kementerian Agama Pusat dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. | Pengawas | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 4. Pemberhentian dari Jabatan Administrasi karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri bagi yang menduduki Jabatan Administrasi; | Administrator | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | b. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara, diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; | Administrator | Seluruh Satuan Kerja |
| | | c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; | Pengawas | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | d. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi; atau | Administrator | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | e. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi. | Administrator | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrasi. | Administrator | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | | | |
| | | 6. Petikan keputusan tentang pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional:<br>a. pengangkatan pertama;<br>b. perpindahan dari jabatan lain;<br>c. penyesuaian/*inpassing*; atau<br>d. promosi. | Ahli Madya | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 7. Petikan keputusan tentang kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional | Ahli Madya | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 8. Petikan Keputusan Pemberhentian dari jabatan fungsional karena:<br>a. mengundurkan diri dari Jabatan atas permintaan sendiri;<br>b. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>c. diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;<br>d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;<br>e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan; atau<br>f. tidak memenuhi persyaratan jabatan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional. | Ahli Madya | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 9. Petikan Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>a. diangkat menjadi pejabat negara;<br>b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>c. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau | Ahli Madya | Seluruh Satuan Kerja |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | d. setelah ditugaskan secara penuh di luar jabatan. | | |
| | | | | |
| | | 10. Cuti di luar tanggungan negara, perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara | Administrator, Ahli Utama, Ahli Madya, dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 11. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah menjalani Cuti Luar Tanggungan Negara | Administrator, Ahli Utama, Ahli Madya, dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 12. Pindah PNS Dalam Lingkungan Kementerian Agama | Ahli Utama dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 13. Pengangkatan Dalam Jabatan Karena Pindah Antar Instansi | Ahli Utama dan jabatan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 14. Penugasan PNS:<br>a. Penugasan pada Instansi Pemerintah;<br>b. Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah; dan<br>c. Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. | | Seluruh Satuan Kerja |

| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS-JENIS MUTASI | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN PUSAT | | | | |
| | 2. Kepala Biro Kepegawaian | 1. Pengangkatan Calon PNS | | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | 2. Pengangkatan PNS | | Sekretariat Jenderal |
| | | | | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | 3. Pencabutan / Pembatalan Calon PNS | | Seluruh Satuan Kerja |
| | | 4. Kenaikan Pangkat | Pengawas, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, dan Pelaksana | Sekretariat Jenderal |
| | | | a. Administrator;<br>b. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata) naik pangkat ke golongan ruang III/d (Penata Tingkat I);<br>c. Ahli Madya;<br>d. Lektor Kepala | Seluruh Satuan Kerja |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli. | Sekolah Tinggi Agama Negeri |
| | | 5. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar bagi PNS pada Kementerian Agama | | Seluruh Satuan Kerja |
| | | 6. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekretariat Jenderal |
| | | 7. Pemberhentian dari jabatan karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>b. diberhentikan sementara sebagai PNS; atau<br>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekretariat Jenderal |
| | | 8. Pemberhentian dari jabatan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara atau tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekretariat Jenderal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan. | Pelaksana | Sekretariat Jenderal |
| | | | | |
| | | 10. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekretariat Jenderal |
| | | | | |
| | | 11. Perubahan dalam jabatan Pelaksana tanpa mengalami perubahan kelas jabatan dan mengalami penurunan dalam kelas Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekretariat Jenderal |
| | | | | |
| | | 12. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui:<br>a. pengangkatan pertama;<br>b. perpindahan dari jabatan lain;<br>c. penyesuaian/*inpassing*; atau<br>d. promosi. | Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 13. Kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional | Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | a. Sekretariat Jenderal; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri. |
| | | | Lektor Kepala | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Lektor | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | | | |
| | | 14. Pemberhentian dari jabatan karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;<br>b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau<br>c. tidak memenuhi persyaratan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional. | Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 15. Pemberhentian dari jabatan karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>b. diberhentikan sementara sebagai PNS menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;<br>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan; atau<br>d. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; | Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 16. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat negara;<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau<br>3) setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>b. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional. | Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 17. Cuti di luar tanggungan negara, perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, dan pengaktifan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 18. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah menjalani Cuti Luar Tanggungan Negara | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 19. Penyesuaian Masa Kerja | | a. Unit Kerja Kementerian Agama Pusat; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri. |
| | | | | |
| | | 20. Pencantuman Gelar Akademik:<br>a. S.1 (strata satu); | | a. Unit Kerja Kementerian Agama Pusat; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri. |
| | | b. S.2 (strata dua); dan<br>c. S.3 (strata tiga). | | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 21. Pindah PNS Dalam Unit Kerja Kementerian Agama Pusat | Ahli Madya | Unit Kerja Kementerian Agama Pusat |
| | | | Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | Sekretariat Jenderal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 22. Pindah PNS Antar-Unit Kerja Kementerian Agama Pusat | Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | Unit Kerja Kementerian Agama Pusat |
| | | | | |
| | | 23. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Kantor Wilayah dan Satu Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; | | |
| | | a. dalam lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri; | Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, Lektor Kepala, dan Asisten Ahli | Sekolah Tinggi Agama Negeri |
| | | b. Antar satuan Kerja pada Satu Kabupaten atau Satu Kotamadya dalam Satu Provinsi pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama; atau | Ahli Madya | Seluruh Satuan Kerja |
| | | c. dalam lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. | Ahli Madya dan Lektor Kepala | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri |
| | | | | |
| | | 24. Pindah PNS Antar Kabupaten Kota Dalam Satu Provinsi:<br>a. Pindah PNS Antar Kabupaten Kota Dalam Satu Provinsi; | Ahli Madya | Kantor Wilayah Kementerian Agama |
| | | b. Pindah PNS Antar Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; | Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | c. Pindah PNS yang menduduki jabatan fungsional guru antar satuan pendidikan formal pada Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, diselenggarakan pada jenjang menengah, berbasis asrama, dan mengembangkan keunggulan akademik; atau | Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia |
| | | d. Pindah PNS antar Perguruan Tinggi Keagamaan dengan lingkungan Kantor Wilayah dalam satu provinsi. | Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli | a. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan<br>b. Kantor Wilayah Kementerian Agama. |
| | | 25. Pindah PNS Antar Provinsi | Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | 26. Pindah PNS di lingkungan Kantor Wilayah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Ke Unit Kerja Kementerian Agama Pusat Atau Sebaliknya | Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | 27. Pengangkatan Dalam Jabatan Karena Pindah Antar Instansi | Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 28. Penugasan PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pada sekolah, perguruan tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta | Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS-JENIS MUTASI | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN PUSAT | | | | |
| | 3. DIREKTORAT JENDERAL | | | |
| | Direktur Jenderal; | 1. Pengangkatan:<br>a. Calon PNS; dan<br>b. PNS. | | Satuan kerja masing-masing |
| | 4. INSPEKTORAT JENDERAL | | | |
| | Inspektur Jenderal; | | | |
| | 5. BADAN | | | |
| | Kepala Badan; | | | |
| | | 2. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi | Pelaksana | Satuan kerja masing-masing |
| | | 3. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi | Pelaksana | Satuan kerja masing-masing |
| | | 4. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi | Pelaksana | Satuan kerja masing-masing |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Pindah PNS Dalam Unit Kerja Kementerian Agama Pusat | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | Satuan kerja masing-masing |
| | | | | |
| | | 6. Kenaikan Pangkat | a. Pengawas;<br>b. Pelaksana;<br>c. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata);<br>d. Ahli Pertama;<br>e. Keterampilan. | Satuan kerja masing-masing |
| | | | | |
| | | 7. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi | Pengawas | Satuan kerja masing-masing |
| | | | | |
| | | 8. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;<br>b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan;<br>d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;<br>e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; | Pengawas dan Pelaksana | Satuan kerja masing-masing |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | f. tidak memenuhi persyaratan; atau<br>g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural. | | |
| | | | | |
| | | 9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan. | Pengawas dan Pelaksana | Satuan kerja masing-masing |
| | | | | |
| | | 10. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional | Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | Satuan kerja masing-masing |

| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS-JENIS MUTASI | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI | | | | |
| | | | | |
| | 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Universitas dan Institut) | 1. Pengangkatan:<br>a. Calon PNS; dan<br>b. PNS. | Calon PNS dan PNS | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 2. Kenaikan Pangkat | a. Pengawas;<br>a. Pelaksana;<br>b. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata);<br>c. Ahli Pertama;<br>d. Keterampilan;<br>e. Lektor;<br>f. Asisten Ahli. | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | 3. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi | Pelaksana | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi | Pelaksana | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 5. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi | Pelaksana | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 6. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi | Pengawas | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 7. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;<br>b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan;<br>d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;<br>e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;<br>f. tidak memenuhi persyaratan; | Pengawas dan Pelaksana | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | atau<br>g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural. | | |
| | | | | |
| | | 8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi meliputi:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan. | Pengawas dan Pelaksana | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 9. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional | Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan dan Lektor | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 10. Penyesuaian Masa Kerja | | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 11. Pencantuman gelar akademik S.1 (strata satu) | | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 12. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing masing- |
| | | | | |
| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS-JENIS MUTASI | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI KEAGAMAAN NEGERI | | | | |
| | 2. Pejabat Administrator yang membidangi Kepegawaian | 1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 2. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |
| | | 3. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi | Pelaksana | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;<br>b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan;<br>d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;<br>e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;<br>f. tidak memenuhi persyaratan; atau<br>g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural. | Pelaksana | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | 5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan. | Pelaksana | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6. Pindah PNS pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri | Pelaksana | Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS-JENIS MUTASI | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI | | | | |
| | 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; | 1. Pengangkatan:<br>a. Calon PNS; atau<br>b. PNS; | | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 2. Kenaikan Pangkat: | a. Pengawas;<br>b. Pelaksana;<br>c. Ahli Muda dengan golongan ruang III/c (Penata);<br>d. Ahli Pertama;<br>e. Keterampilan. | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan |
| | | | | |
| | | 3. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi | Pelaksana | Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 4. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi | Pelaksana | Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi | Pelaksana | Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 6. Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi | Pengawas | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 7. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;<br>b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan;<br>d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;<br>e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;<br>f. tidak memenuhi persyaratan; atau<br>g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural. | Pengawas | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | Pelaksana | Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat | Pengawas | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | Pelaksana | Pada Kantor Wilayah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | negara; atau<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan. | | Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 9. Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional | Ahli Muda. Ahli Pertama, dan Keterampilan | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; |
| | | | | |
| | | 10. Penyesuaian Masa Kerja | | a. di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan<br>b. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia |
| | | | | |
| | | 11. Pencantuman gelar akademik S.1 (strata satu) | | a. di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan<br>b. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 12. Pindah PNS Dalam Satu Lingkungan Kantor Wilayah; | | |
| | | a. Pindah PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota | Pengawas, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | b. Pindah PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Pelaksana | Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 13. Pindah PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi | Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS-JENIS MUTASI | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA | | | | |
| | 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; | 1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Administrasi | Pelaksana | Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |
| | | | | |
| | | 2. Perubahan dalam Jabatan tanpa mengalami perubahan Kelas Jabatan dan Penurunan dalam Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi | Pelaksana | Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. Kenaikan Dalam Kelas Jabatan Administrasi | Pelaksana | Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |
| | | | | |
| | | 4. Pemberhentian dari jabatan administrasi karena:<br>a. mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;<br>b. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara;<br>c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan;<br>d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi;<br>e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;<br>f. tidak memenuhi persyaratan; atau<br>g. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural. | Pelaksana | Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Administrasi:<br>a. setelah diberhentikan sementara sebagai PNS, karena:<br>1) diangkat menjadi pejabat negara; atau<br>2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;<br>b. setelah menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau<br>c. setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan. | Pelaksana | Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |
| | | | | |
| | | 6. Pindah PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota | Pelaksana | Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |

B. PEMBERIAN KUASA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)

| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS PEMBERHENTIAN | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | UNIT KERJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN PUSAT | | | | |
| A | 1. Sekretaris Jenderal; | 1. Penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja bagi Calon PNS dan PNS | Calon PNS dan PNS | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 2. Penetapan tewas bagi Calon PNS dan PNS pada Kementerian Agama | Calon PNS dan PNS | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 3. Masa persiapan pensiun bagi PNS | Administrator dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 4. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 5. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 6. Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 8. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Profesor | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 9. Pemberhentian Karena Tewas (dengan hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten ahl | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 10. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, jabatan Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 11. Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 12. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Profesor, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 13. Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun); | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Profesor, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, jabatan fungsional Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 14. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun); | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 15. Pemberhentian Karena Hal Lain (Dengan Hak Pensiun dan Tanpa Hak Pensiun) | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi, Ahli Madya, ahli muda, ahli pertama, Keterampilan, Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | 2. Kepala Biro Kepegawaian | 1. Masa Persiapan Pensiun | Ahli Madya dan Lektor Kepala | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli | a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri. |
| | | 2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Administrator, Ahli Madya, dan Lektor Kepala | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | a. ~~Unit~~ Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri. |
| | | 3. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Administrator, Ahli Madya dan Lektor Kepala | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri. |
| | | 5. Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (Dengan Hak Pensiun dan Tanpa Hak Pensiun) | Administrator, Pengawas, Pelaksana, Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | | |
| | | 6. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Administrator, Ahli Madya dan jabatan Lektor Kepala | Seluruh Satuan Kerja |
| | | | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri. |
| | | | | |
| | | 7. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat |
| | | | | |
| | | 8. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Administrator, Ahli Madya dan Lektor Kepala | Seluruh Satuan Kerja |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | a. Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat; dan<br>b. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri; |
| | | | | |
| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS PEMBERHENTIAN | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. | | | | |
| | 3. DIREKTORAT JENDERAL | 1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | Satuan Kerja masing-masing |
| | Direktur Jenderal; | 2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | Satuan Kerja masing-masing |
| | 4. INSPEKTORAT JENDERAL | | | |
| | Inspektur Jenderal; | | | |
| | 5. BADAN | | | |
| | Kepala Badan; | | | |

| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS PEMBERHENTIAN | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI | | | | |
| | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Universitas dan Institut) | 1. Masa Persiapan Pensiun | Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | 2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | 3. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | 4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |
| | | 5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, Keterampilan, Lektor dan Asisten Ahli | Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing |

| No. | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | JENIS PEMBERHENTIAN | PNS YANG MENDUDUKI JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI | | | | |
| | Kepala Kantor Wilayah ; | 1. Masa Persiapan Pensiun | Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Keterampilan | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 2. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 3. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |
| | | 4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun) | Pengawas, Pelaksana, Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS